

2025

BUKU STATISTIK

ASN Kabupaten Banjar
Semester II



BKPSDM
KABUPATEN BANJAR



**Buku Statistik Kepegawaian
Aparatur Sipil Negara
Semester II Tahun 2025**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANJAR**

KATA PENGANTAR

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar, selaku pejabat yang berwenang di lingkup kepegawaian Kabupaten Banjar, mempunyai uraian tugas sesuai dengan keputusan Bupati Banjar Nomor 37 Tahun 2022, tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tanggal 20 Mei 2022, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mnejadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis manajemen kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
2. Pelaksanaan tugas manajemen kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
3. Pemenatauan, evaluasi dan pelaporan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
5. Pengelolaan kesekretariatan organisasi profesi ASN Kabupaten;
6. Pelaksanaan administrasi BKPSDM; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
VISI DAN MISI	7
TUGAS POKOK.....	10
1. Perbandingan Jumlah PNS dan PPPK	16
2. Pertumbuhan ASN	17
3. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	18
4. Jumlah ASN Berdasarkan Rentang Usia.....	20
5. Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan	21
6. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan.....	22
1. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin 5 Tahun Terakhir.....	24
2. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia	25
3. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan.....	26
4. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Golongan 5 Tahun Terakhir	27
5. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Jabatan 5 Tahun Terakhir.....	28
6. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan dan Jenis Jabatan.....	29
7. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Eselon .	31

8.	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Dan Eselon	32
9.	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Pendidikan (Khusus Sekolah).....	33
10.	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Pendidikan (Khusus Diploma).....	35
11.	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Pendidikan (Khusus Sarjana)	37
12.	REKAPITULASI PNS BERDASARKAN UNIT ORGANISASI DAN KELOMPOK JABATAN.....	39
13.	REKAPITULASI PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (SD, SMP, SMA)	42
14.	REKAPITULASI PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN (D-I, D-II, D-III, D-IV)	46
15.	REKAPITULASI PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN (S1, S2, S3)	51
1.	Jumlah PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin 5 Tahun Terakhir.....	56
2.	Jumlah PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia ...	57
3.	Jumlah PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan.....	58
4.	Jumlah PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Golongan	59
5.	Jumlah PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan Dan Jenis Jabatan.....	60
6.	REKAPITULASI PPPK & PPPK PW BERDASARKAN UNIT ORGANISASI DAN KELOMPOK JABATAN	61



7.	REKAPITULASI PPPK & PPPK PW BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (SD, SMP, SMA)	65
8.	REKAPITULASI PPPK & PPPK PW BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN (D-I, D-II, D-III, D-IV)	69
9.	REKAPITULASI PPPK & PPPK PW BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN (S1, S2, S3)	73

VISI DAN MISI

Visi

“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri, Dan Agamis”

Penjelasan :

Maju :

- Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang.
- Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Mandiri :

- Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain.
- Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan.
- Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan,



pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan.

- Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.

Agamis :

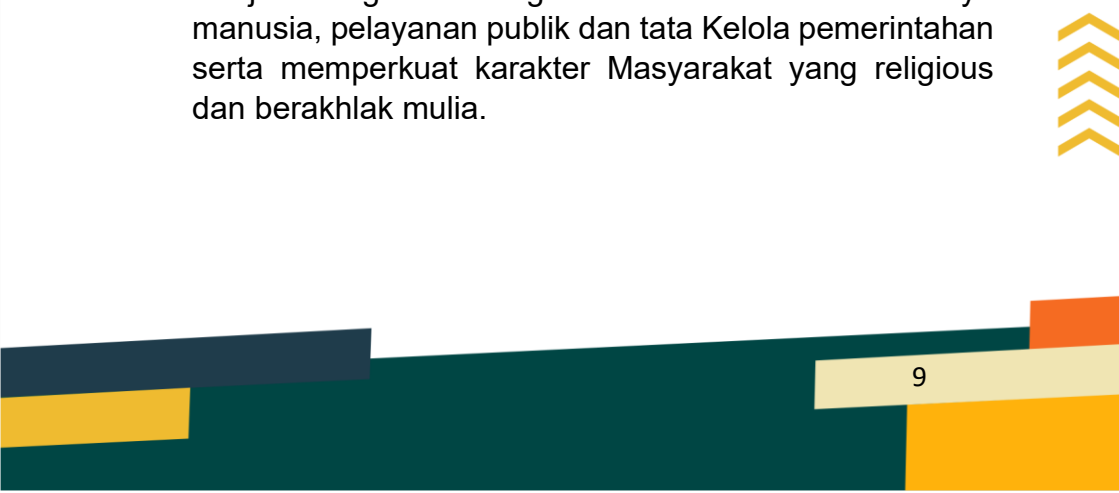
- Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin - doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.

Misi

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia;
Ini mencakup upaya untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar, serta
- 

- 
- mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan program pengembangan.
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif;
BKPSDM berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta memastikan pelayanan publik yang berkualitas.
 3. Menciptakan kehidupan ma
 4. syarakat yang tertib, aman, dan demokratis;
BKPSDM turut mendukung terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan demokratis, termasuk dalam hal penegakan aturan dan perundang-undangan.
 5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur;
BKPSDM mendukung upaya pembentukan karakter masyarakat yang kuat dalam nilai-nilai agama dan moral.

Secara keseluruhan, BKPSDM Kabupaten Banjar bertujuan untuk mendukung terwujudnya visi Kabupaten Banjar dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan serta memperkuat karakter Masyarakat yang religious dan berakhlak mulia.



TUGAS POKOK

Tugas Pokok BKPSDM

BKPSDM mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah.

Berikut adalah uraian tugas Badan :

- a. Merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian, pembinaan, penilaian, evaluasi kinerja aparatur dan informasi kepegawaian, bidang pengembangan karir dan mutasi, dan bidang pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- c. Meyelenggarakan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian, pembinaan, penilaian, evaluasi kinerja aparatur dan informasi kepegawaian, bidang pengembangan karir dan mutasi, dan bidang pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Badan;
- e. Mengawasi dan mengendalikan bidang pengadaan, pemberhentian, pembinaan, penilaian, evaluasi kinerja aparatur dan informasi kepegawaian, bidang

- 
- pengembangan karir dan mutasi, dan bidang pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang pengadaan, pemberhentian, pembinaan, penilaian, evaluasi kinerja aparatur dan informasi kepegawaian, bidang pengembangan karir dan mutasi, dan bidang pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - g. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja di bidang pengadaan, pemberhentian, pembinaan, penilaian, evaluasi kinerja aparatur dan informasi kepegawaian, bidang pengembangan karir dan mutasi, dan bidang pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - h. Membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personal di lingkungan Badan;
 - i. Membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan UPTD;
 - j. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.





INFOGRAFIS DATA ASN

**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PER 31 DESEMBER 2025**

Jumlah ASN
10200

BERDASARKAN PENDIDIKAN

SD-SMA
1652

D1-DIV
1711

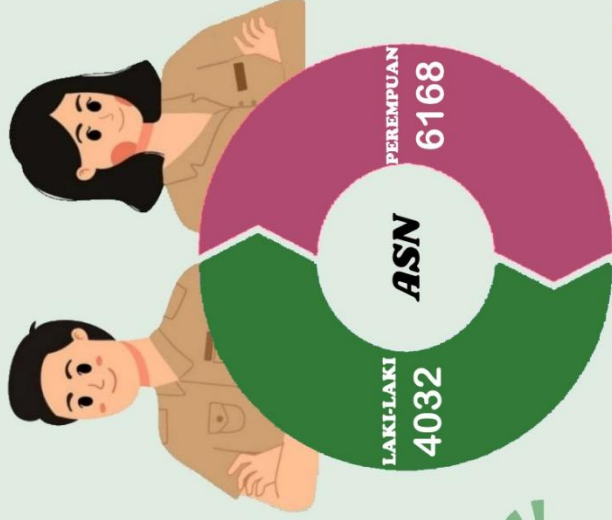
S1-S3
6837

BERDASARKAN JENIS JABATAN

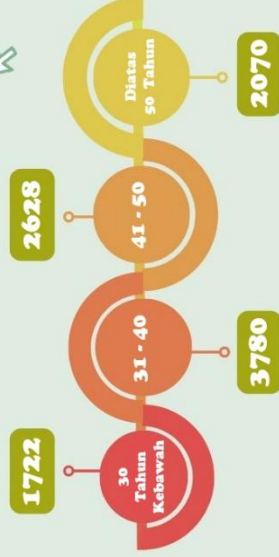
STRUKTURAL
662

FUNGSIONAL
3833

PELAKSANA
784



BERDASARKAN RENTANG USIA



BERDASARKAN GOLONGAN

PPPK

GOL III
135

GOL V
256

GOL VII
578

GOL IX
2185

GOL X
104

PNS

I
17

II
490

III
3685

IV
1087



BKPSDM

PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEMESTER II TAHUN 2025

JUMLAH PNS

5279



23 JPT

149 Administrator

490 Pengawas



3.258

2.021



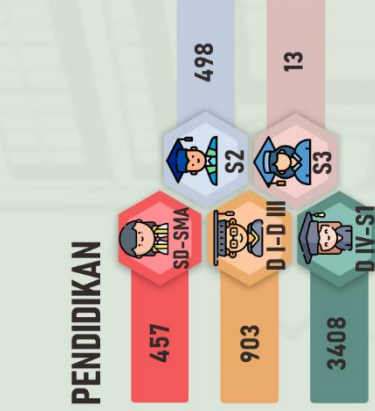
FUNGSIONAL

PELAKSANA

3833

784

GOLONGAN PNS





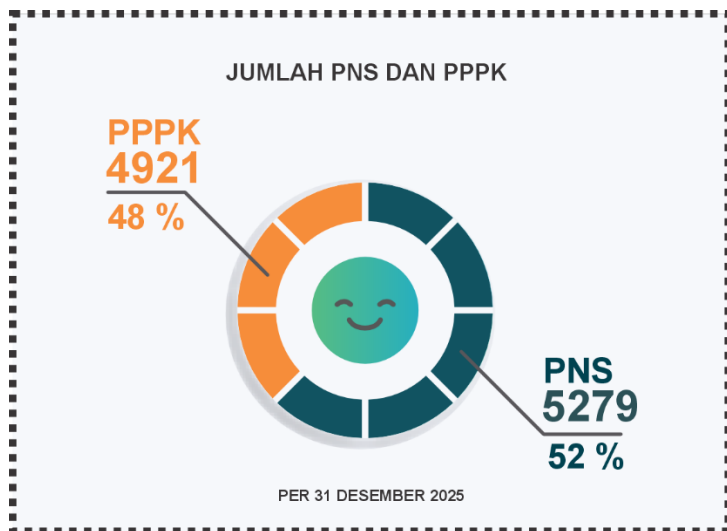
BKPSDM

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

SEMESTER II TAHUN 2025



1. Perbandingan Jumlah PNS dan PPPK



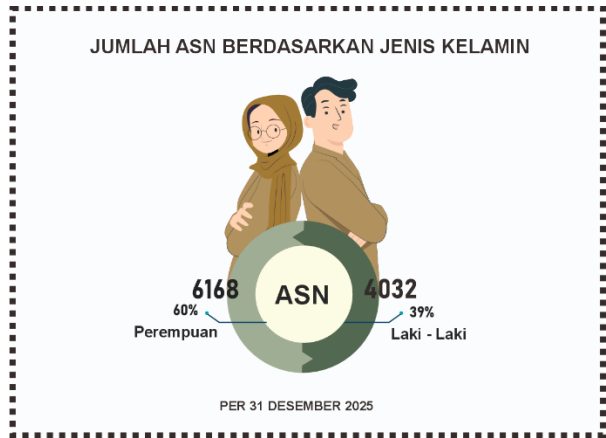
Pada kondisi per 31 Desember 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banjar yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah 10200 dengan rincian jumlah PNS 5279 (52%) dan PPPK berjumlah 4921 (48%). Dapat dilihat bahwa PNS lebih mendominasi dibandingkan dengan PPPK. Hal tersebut dikarenakan pengadaan PPPK baru diadakan akhir-akhir ini.

2. Pertumbuhan ASN



Berdasarkan gambar grafik di atas, terdapat penurunan jumlah PNS sejak 2021 yang berjumlah 6259 hingga sekarang yang hanya berjumlah 5279 orang. Jika dibandingkan dengan PPPK, PNS memiliki persentase sekitar 52% dari seluruh jumlah ASN di kabupaten Banjar. Sedangkan untuk PPPK mengalami kenaikan sejak pertama kali ditetapkan pada tahun 2021 yang dulunya berjumlah 92 naik menjadi 4921 pada tahun 2025 ini. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan ASN sebagian besar dari PPPK.

3. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin



ASN Pemerintah Kabupaten Banjar berjenis kelamin PEREMPUAN masih mendominasi bila dibandingkan dengan ASN Pemerintah Kabupaten Banjar berjenis kelamin LAKI-LAKI. Jumlah ASN LAKI-LAKI sebanyak 4032 (39%) dan jumlah ASN PEREMPUAN sebanyak 6168 (61%).

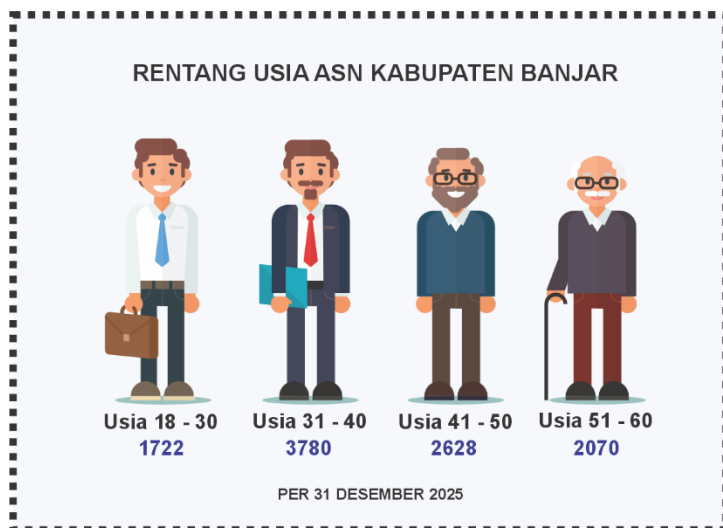
TAHUN	ASN				
	L	%	P	%	JUMLAH
2021	2607	41.05	3744	58.95	6351
2022	2658	39.41	4087	60.59	6745
2023	2669	36.66	4612	63.34	7281
2024	2920	36.34	5115	63.66	8035



2025 SEMESTER II	4032	39.5 3	6168	60.4 7	10200
-----------------------------	------	-----------	------	-----------	-------

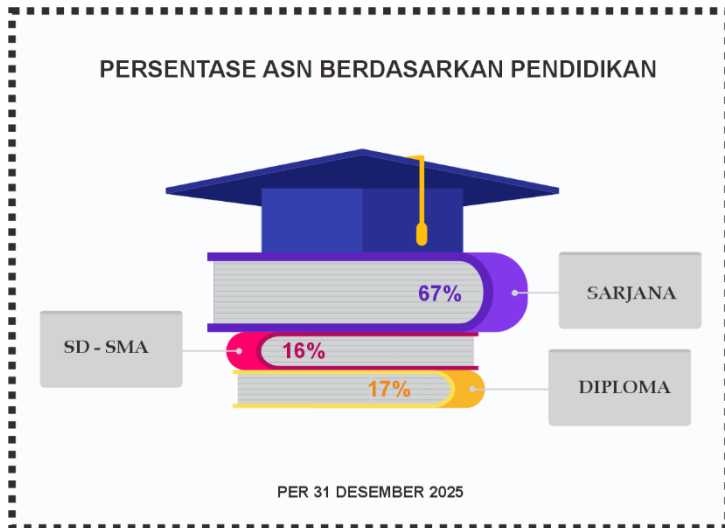
Dapat dilihat dari tabel tersebut, tidak hanya tahun ini, sejak 5 tahun terakhir ASN PEREMPUAN masih mendominasi bila dibandingkan dengan ASN LAKI-LAKI.

4. Jumlah ASN Berdasarkan Rentang Usia



Sebagian Besar ASN Kabupaten Banjar Berada di Kelompok Usia 31-40 tahun kemudian disusul kelompok usia 41-50 tahun. Jumlah dan Jabatan-jabatan pada kelompok usia ini akan menjadi pertimbangan utama dalam penataan ASN maupun penyusunan rencana pengadaan.

5. Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan gambar diatas Tingkat Pendidikan Sarjana merupakan jenjang Pendidikan terbanyak yaitu 67%, di ikuti diploma 17% dan SD-SMA 16%.

6. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan



Berdasarkan grafik jenis jabatan diatas, jabatan fungsional Adalah jabatan yang terbanyak diantara jenis jabatan yang lainnya sebesar 6355 orang, kemudian disusul jenis jabatan pelaksana sebesar 3183 orang dan jenis jabatan struktural sebesar 662 orang.



TABEL PENYAJIAN

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin 5 Tahun Terakhir

TAHUN	PNS				
	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH
2021	2573	41.11	3686	58.89	6259
2022	2509	40.08	3751	59.92	6260
2023	2296	39.17	3566	60.83	5862
2024	2216	38.95	3473	61.05	5689
2025 SEMESTER II	2021	38.28	3258	61.72	5279

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

USIA	PNS		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
DIBAWAH 30	86	197	283
30 – 40	480	894	1374
41 – 50	631	1143	1774
DIATAS 50	824	1024	1848
JUMLAH	2021	3258	5279

3. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	PNS		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
SD	19	3	22
SLTP	29	3	32
SLTA	258	145	403
D-1	1	9	10
D-II	60	43	103
D-III	196	594	790
D-IV	31	97	128
S-1/SARJANA	1204	2076	3280
S-2/MAGISTER	214	284	498
S-3/DOKTOR	9	4	13
JUMLAH	2021	3258	5279

4. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Golongan 5 Tahun Terakhir

TAHUN	GOL. I		GOL. II		GOL. III		GOL. IV	
	L	P	L	P	L	P	L	P
2021	50	4	423	408	1437	2459	663	815
2022	35	3	412	419	1454	2578	608	751
2023	27	2	340	338	1418	2550	511	676
2024	23	2	297	298	1381	2475	515	698
2025 SEMESTER II	16	1	246	244	1301	2384	458	629

5. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Jabatan 5 Tahun Terakhir

TAHUN	PNS			
	STRUKTURAL	FUNGSIONAL TERTENTU	FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH
2021	773	4340	1146	6259
2022	710	4417	1133	6260
2023	761	4170	931	5862
2024	743	4027	919	5689
2025 Semester II	662	3833	784	5279

6. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan dan Jenis Jabatan

NO	GOL. RUANG	ESELON			STRUKTURAL			FUNGSIONAL TERTENTU			FUNGSIONAL UMUM			JML
		II	III	IV	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
1	JURU MUDA (I/a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JURU MUDA TINGKAT I (I/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	JURU (I/c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
4	JURU TINGKAT I (I/d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	15	15
5	PENGATUR MUDA (II/a)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	27	3	30	32
6	PENGATUR MUDA TK.I (II/b)	0	0	0	0	0	0	1	1	2	21	6	27	29
7	PENGATUR (II/c)	0	0	0	0	0	0	25	32	57	46	29	75	132
8	PENGATUR TK.I (II/d)	0	0	0	0	0	0	61	153	214	65	18	83	297
9	PENATA MUDA (III/a)	0	0	2	1	1	2	99	218	317	154	121	275	594
10	PENATA MUDA TK. I (III/b)	0	0	42	25	17	42	266	524	790	52	54	106	938
11	PENATA (III/c)	0	0	100	64	36	100	162	434	596	21	40	61	757
12	PENATA TK. I (III/d)	0	13	260	135	138	273	289	740	1029	33	61	94	1396

NO	GOL. RUANG	ESELON			STRUKTURAL			FUNGSIONAL TERTENTU			FUNGSIONAL UMUM			JML
		II	III	IV	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
13	PEMBINA (IV/a)	0	97	82	99	80	179	126	213	339	8	7	15	533
14	PEMBINA TK. I (IV/b)	8	39	4	38	13	51	130	219	349	0	1	1	401
15	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	14	0	0	10	4	14	46	92	138	0	0	0	152
16	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH		23	149	490	373	289	662	1205	2628	3833	443	341	784	5279

7. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Eselon

N O	KELOMPOK JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
STRUKTURAL				
1	II.a	1	0	1
2	II.b	16	6	22
3	III.a	36	9	45
4	III.b	66	38	104
5	IV.a	201	178	379
6	IV.b	53	58	111
JUMLAH		373	289	662

8. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Dan Eselon

N O	GOLONGAN RUANG	ESELON		
		II	III	IV
1	JURU MUDA (I/a)	0	0	0
2	JURU MUDA TINGKAT I (I/b)	0	0	0
3	JURU (I/c)	0	0	0
4	JURU TINGKAT I (I/d)	0	0	0
5	PENGATUR MUDA (II/a)	0	0	0
6	PENGATUR MUDA TK.I (II/b)	0	0	0
7	PENGATUR (II/c)	0	0	0
8	PENGATUR TK.I (II/d)	0	0	0
9	PENATA MUDA (III/a)	0	0	2
10	PENATA MUDA TK. I (III/b)	0	0	42
11	PENATA (III/c)	0	0	100
12	PENATA TK. I (III/d)	0	13	260
13	PEMBINA (IV/a)	0	97	82
14	PEMBINA TK. I (IV/b)	8	39	4
15	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	14	0	0
16	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	1	0	0
JUMLAH		23	149	490

9. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Pendidikan (Khusus Sekolah)

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN								
		SD			SLTP			SLTA		
		L	P	JM L	L	P	JML	L	P	JML
1	JURU MUDA (I/a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JURU MUDA TINGKAT I (I/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	JURU (I/c)	2	0	2	0	0	0	0	0	0
4	JURU TINGKAT I (I/d)	8	1	9	5	0	5	1	0	1
5	PENGATUR MUDA (II/a)	9	2	11	13	0	13	5	2	7
6	PENGATUR MUDA TK.I (II/b)	0	0	0	6	3	9	14	4	18
7	PENGATUR (II/c)	0	0	0	5	0	5	28	19	47
8	PENGATUR TK.I (II/d)	0	0	0	0	0	0	62	20	82
9	PENATA MUDA (III/a)	0	0	0	0	0	0	94	52	146
10	PENATA MUDA TK. I (III/b)	0	0	0	0	0	0	21	19	40
11	PENATA (III/c)	0	0	0	0	0	0	5	0	5
12	PENATA TK. I (III/d)	0	0	0	0	0	0	12	17	29



13	PEMBINA (IV/a)	0	0	0	0	0	0	15	12	27
14	PEMBINA TK. I (IV/b)	0	0	0	0	0	0	1	0	1
15	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		19	3	22	29	3	32	258	145	403

10. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Pendidikan (Khusus Diploma)

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN											
		D-I			D-II			D-III			D-IV		
		L	P	JM L	L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JM L
1	JURU MUDA (I/a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JURU MUDA TINGKAT I (I/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	JURU (I/c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	JURU TINGKAT I (I/d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PENGATUR MUDA (II/a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	PENGATUR MUDA TK.I (II/b)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
7	PENGATUR (II/c)	0	1	1	1 1	3	14	27	34	61	0	1	1
8	PENGATUR TK.I (II/d)	0	0	0	1 5	9	24	46	12 8	174	0	6	6
9	PENATA MUDA (III/a)	0	3	3	4	8	12	8	67	75	7	1 5	22
10	PENATA MUDA TK. I (III/b)	1	2	3	8	2	10	16	91	107	2	1 2	14
11	PENATA (III/c)	0	0	0	0	0	0	32	11 0	142	6	1 1	17
12	PENATA TK. I (III/d)	0	3	3	4	3	7	67	16 3	230	8	3 5	43



13	PEMBINA (IV/a)	0	0	0	1 6	1 8	34	0	1	1	4	3	7
14	PEMBINA TK. I (IV/b)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	6	10
15	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
16	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		1	9	10	6 0	4 3	103	19 6	59 4	790	3 1	9 7	128

11. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Pendidikan (Khusus Sarjana)

NO	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN								
		S1			S2			S3		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	JURU MUDA (I/a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JURU MUDA TINGKAT I (I/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	JURU (I/c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	JURU TINGKAT I (I/d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PENGATUR MUDA (II/a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PENGATUR MUDA TK.I (II/b)	1	0	1	0	0	0	0	0	0
7	PENGATUR (II/c)	0	3	3	0	0	0	0	0	0
8	PENGATUR TK.I (II/d)	2	7	9	1	1	2	0	0	0
9	PENATA MUDA (III/a)	140	190	330	1	5	6	0	0	0
10	PENATA MUDA TK. I (III/b)	282	441	723	13	28	41	0	0	0
11	PENATA (III/c)	189	366	555	15	23	38	0	0	0
12	PENATA TK. I (III/d)	335	651	986	29	67	96	2	0	2



NO	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN								
		S1			S2			S3		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
13	PEMBINA (IV/a)	106	161	267	89	104	193	3	1	4
14	PEMBINA TK. I (IV/b)	118	195	313	43	30	73	1	2	3
15	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	31	62	93	23	26	49	2	1	3
16	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	0	0	0	0	0	0	1	0	1
JUMLAH		1204	2076	3280	214	284	498	9	4	13



12. REKAPITULASI PNS BERDASARKAN UNIT ORGANISASI DAN KELOMPOK JABATAN

NO	GOLONGAN RUANG	STRUKTURAL			FUNGSIONAL TERTENTU			FUNGSIONAL UMUM			JUMLAH		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JM L
1	SEKRETARIAT DAERAH	18	18	36	8	12	20	34	25	59	60	55	115
2	STAF AHLI	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
3	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	4	7	11	0	0	0	11	7	18	15	14	29
4	INSPEKTORAT DAERAH	6	3	9	10	24	34	2	2	4	18	29	47
5	DINAS PENDIDIKAN	10	9	19	864	1587	2451	82	80	162	956	1676	2632
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	14	10	24	0	2	2	17	13	30	31	25	56
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	9	11	20	1	2	3	4	5	9	14	18	32
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	3	11	0	0	0	4	3	7	12	6	18
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	4	12	0	2	2	4	3	7	12	9	21
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9	5	14	8	9	17	11	18	29	28	32	60
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6	5	11	0	2	2	3	5	8	9	12	21
12	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	7	2	9	0	0	0	5	2	7	12	4	16
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	8	5	13	0	8	8	7	8	15	15	21	36
14	DINAS PERTANIAN	15	16	31	0	0	0	9	8	17	24	24	48
15	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8	12	20	0	0	0	8	6	14	16	18	34
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	7	8	4	5	9	3	3	6	8	15	23
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2	0	2	10	17	27	2	3	5	14	20	34
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6	9	15	0	0	0	2	6	8	8	15	23
19	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	15	12	27	3	1	4	19	6	25	37	19	56
20	DINAS PERHUBUNGAN	12	2	14	1	1	2	15	6	21	28	9	37

NO	GOLONGAN RUANG	STRUKTURAL			FUNGSIONAL TERTENTU			FUNGSIONAL UMUM			JUMLAH		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JM L
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	4	3	7	1	3	4	3	3	6	8	9	17
22	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	18	10	28		2	2	35	14	49	53	26	79
23	DINAS KESEHATAN	23	24	47	175	696	871	24	46	70	222	766	988
24	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	13	9	22	1		1	9	6	15	23	15	38
25	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	14	18	0	0	0	6	5	11	10	19	29
26	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN	11	6	17	0	1	1	1	5	6	12	12	24
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8	3	11	11	1	12	19		19	38	4	42
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA	9	9	18	108	253	361	39	29	68	156	291	447
29	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA	4	2	6	0	0	0	1	1	2	5	3	8
30	PEMERINTAH KECAMATAN PENGARON	2	3	5	0	0	0	4		4	6	3	9
31	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI TABUK	2	4	6	0	0	0	3	2	5	5	6	11
32	PEMERINTAH KECAMATAN GAMBUT	4	2	6	0	0	0	6		6	10	2	12
33	PEMERINTAH KECAMATAN ARANIO	6	1	7	0	0	0	3	1	4	9	2	11
34	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	1	3	4	0	0	0	4	1	5	5	4	9
35	PEMERINTAH KECAMATAN PARAMASAN	5	1	6	0	0	0	1	0	1	6	1	7
36	PEMERINTAH KECAMATAN ASTAMBUL	4	3	7	0	0	0	3		3	7	3	10
37	PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT	5	2	7	0	0	0	0	1	1	5	3	8
38	PEMERINTAH KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	6	1	7	0	0	0	2	0	2	8	1	9
39	PEMERINTAH KECAMATAN ALUH-ALUH	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
40	PEMERINTAH KECAMATAN KARANG INTAN	4	3	7	0	0	0	5	0	5	9	3	12
41	PEMERINTAH KECAMATAN CINTAPURI DARUSALAM	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI PINANG	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
43	PEMERINTAH KECAMATAN MATARAMAN	6	2	8	0	0	0	3	1	4	9	3	12
44	PEMERINTAH KECAMATAN BERUNTUNG BARU	5	2	7	0	0	0	4	0	4	9	2	11
45	PEMERINTAH KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10

NO	GOLONGAN RUANG	STRUKTURAL			FUNGSIONAL TERTENTU			FUNGSIONAL UMUM			JUMLAH		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JM L
46	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA BARAT	2	6	8	0	0	0	4	0	4	6	6	12
47	PEMERINTAH KECAMATAN TATAH MAKMUR	5	3	8	0	0	0	2	0	2	7	3	10
48	PEMERINTAH KECAMATAN KERTAK HANYAR	2	6	8	0	0	0	3	1	4	5	7	12
49	PEMERINTAH KELURAHAN KERTAK HANYAR	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
50	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI LULUT	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
51	PEMERINTAH KELURAHAN SEKUMPUL	4	0	4	0	0	0	0	2	2	4	2	6
52	PEMERINTAH KELURAHAN TANJUNG REMA DARAT	2	2	4	0	0	0	3	2	5	5	4	9
53	PEMERINTAH KELURAHAN MANARAP LAMA	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
54	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI PARING	1	4	5	0	0	0	1	4	5	2	8	10
55	PEMERINTAH KELURAHAN MANDARSARI	2	2	4	0	0	0	1	0	1	3	2	5
56	PEMERINTAH KELURAHAN GAMBUT	1	1	2	0	0	0	0	1	1	1	2	3
57	PEMERINTAH KELURAHAN PASAYANGAN	1	2	3	0	0	0	1	1	2	2	3	5
58	PEMERINTAH KELURAHAN GAMBUT BARAT	2	3	5	0	0	0	1	2	3	3	5	8
59	PEMERINTAH KELURAHAN MURUNG KERATON	2	3	5	0	0	0	0	1	1	2	4	6
60	PEMERINTAH KELURAHAN JAWA	2	3	5	0	0	0	1	3	4	3	6	9
61	PEMERINTAH KELURAHAN KERATON	2	2	4	0	0	0	1	0	1	3	2	5
JUMLAH		373	289	662	1205	2628	3833	443	341	784	2021	3258	5279

13. REKAPITULASI PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (SD, SMP, SMA)

NO	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN											
		SD			SMP			SMA			JUMLAH		
		L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L
1	SEKRETARIAT DAERAH	1		1	1		1	11	6	17	13	6	38
2	STAF AHLI			0			0			0	0	0	0
3	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	1		1	3		3	5	2	7	9	2	22
4	INSPEKTORAT DAERAH			0			0			0	0	0	0
5	DINAS PENDIDIKAN	4		4	5		5	63	75	138	72	75	294
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			0			0	6		6	6	0	12
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1		1			0		1	1	1	1	4
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			0			0	2		2	2	0	4
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			0			0		1	1	0	1	2
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			0	1		1	2		2	3	0	6
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1		1	1		1	1	1	2	3	1	8
12	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			0			0	2	1	3	2	1	6
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			0			0	2		2	2	0	4
14	DINAS PERTANIAN			0		1	1	5	1	6	5	2	14
15	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			0			0	2	2	4	2	2	8

NO	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN											
		SD			SMP			SMA			JUMLAH		
		L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			0			0	1	1	2	1	1	4
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			0			0	2	1	3	2	1	6
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			0			0	1	1	2	1	1	4
19	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN			0	1		1	6	3	9	7	3	20
20	DINAS PERHUBUNGAN			0			0	4		4	4	0	8
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			0	1		1		1	1	1	1	4
22	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	6	2	8	10	2	12	15	4	19	31	8	78
23	DINAS KESEHATAN	2		2			0	19	15	34	21	15	72
24	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			0	1		1			0	1	0	2
25	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		1	1			0	4	1	5	4	2	12
26	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN			0			0	1	1	2	1	1	4
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			0			0	26	1	27	26	1	54
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA			0	1		1	25	9	34	26	9	70
29	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA			0			0	1		1	1	0	2
30	PEMERINTAH KECAMATAN PENGARON			0			0	4		4	4	0	8
31	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI TABUK			0			0	3	1	4	3	1	8

NO	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN											
		SD			SMP			SMA			JUMLAH		
		L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L
32	PEMERINTAH KECAMATAN GAMBUT			0			0	5		5	5	0	10
33	PEMERINTAH KECAMATAN ARANIO			0			0	3		3	3	0	6
34	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	1		1	2		2		2	2	3	2	10
35	PEMERINTAH KECAMATAN PARAMASAN			0			0	2		2	2	0	4
36	PEMERINTAH KECAMATAN ASTAMBUL			0			0	4		4	4	0	8
37	PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT			0			0			0	0	0	0
38	PEMERINTAH KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG			0			0	2		2	2	0	4
39	PEMERINTAH KECAMATAN ALUH-ALUH			0	1		1	2		2	3	0	6
40	PEMERINTAH KECAMATAN KARANG INTAN			0			0	5		5	5	0	10
41	PEMERINTAH KECAMATAN CINTAPURI DARUSALAM			0	1		1			0	1	0	2
42	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI PINANG	1		1			0			0	1	0	2
43	PEMERINTAH KECAMATAN MATARAMAN			0			0	3	1	4	3	1	8
44	PEMERINTAH KECAMATAN BERUNTUNG BARU			0			0	4		4	4	0	8
45	PEMERINTAH KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR			0			0	3		3	3	0	6
46	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA BARAT	1		1			0	2	1	3	3	1	8
47	PEMERINTAH KECAMATAN TATAH MAKMUR			0			0	1		1	1	0	2
48	PEMERINTAH KECAMATAN KERTAK HANYAR			0			0	2	1	3	2	1	6
49	PEMERINTAH KELURAHAN KERTAK HANYAR			0			0			0	0	0	0
50	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI LULUT			0			0			0	0	0	0

NO	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN											
		SD			SMP			SMA			JUMLAH		
		L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L
51	PEMERINTAH KELURAHAN SEKUMPUL			0			0		2	2	0	2	4
52	PEMERINTAH KELURAHAN TANJUNG REMA DARAT			0			0	1		1	1	0	2
53	PEMERINTAH KELURAHAN MANARAP LAMA			0			0			0	0	0	0
54	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI PARING			0			0	1	1	2	1	1	4
55	PEMERINTAH KELURAHAN MANDARSARI			0			0	1		1	1	0	2
56	PEMERINTAH KELURAHAN GAMBUT			0			0		1	1	0	1	2
57	PEMERINTAH KELURAHAN PASAYANGAN			0			0	1	1	2	1	1	4
58	PEMERINTAH KELURAHAN GAMBUT BARAT			0			0	1	2	3	1	2	6
59	PEMERINTAH KELURAHAN MURUNG KERATON			0			0		1	1	0	1	2
60	PEMERINTAH KELURAHAN JAWA			0			0		3	3	0	3	6
61	PEMERINTAH KELURAHAN KERATON			0			0	2		2	2	0	4
JUMLAH		19	3	22	29	3	32	258	145	403	306	151	914

14. REKAPITULASI PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN (D-I, D-II, D-III, D-IV)

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN												JUMLAH		
		D.I			D.II			D.III			D.IV					
		L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JML
1	SEKRETARIAT DAERAH		1	1		1	1	1	2	3	5	4	9	6	8	14
2	STAF AHLI			0			0			0			0	0	0	0
3	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)			0			0			0		1	1	0	1	1
4	INSPEKTORAT DAERAH			0			0			0		2	2	0	2	2
5	DINAS PENDIDIKAN			0	5 6	4 1	97		7	7			0	56	48	104
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			0			0		2	2	1		1	1	2	3
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			0			0		1	1			0	0	1	1
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			0			0	1		1			0	1	0	1
9	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH			0			0		1	1	1	1	2	1	2	3
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			0			0	4	6	10	2	2	4	6	8	14
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			0			0		1	1			0	0	1	1
12	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			0			0	1		1			0	1	0	1
13	DINAS KETAHANAN			0			0		3	3			0	0	3	3

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN												JUMLAH		
		D.I			D.II			D.III			D.IV					
		L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JML
	PANGAN DAN PERIKANAN															
14	DINAS PERTANIAN			0			0	2		2			0	2	0	2
15	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1		1			0			0		1	1	1	1	2
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			0			0	3	3	6		1	1	3	4	7
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			0			0			0			0	0	0	0
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			0			0	1	2	3	1		1	2	2	4
19	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN			0			0	6		6	1		1	7	0	7
20	DINAS PERHUBUNGAN			0	2		2	8		8	3	6	9	13	6	19
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			0			0	3		3			0	3	0	3
22	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			0			0	1		1			0	1	0	1
23	DINAS KESEHATAN		6	6			0	10 6	43 1	537	6	6 3	69	11 2	50 0	612
24	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			0			0	1		1	1		1	2	0	2
25	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN			0			0	1	1	2		1	1	1	2	3

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN												JUMLAH		
		D.I			D.II			D.III			D.IV					
		L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JML
	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
26	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN			0			0		3	3			0	0	3	3
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			0			0			0			0	0	0	0
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA		1	1	1		1	46	12 6	172	7	1 4	21	54	14 1	195
29	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA			0			0			0			0	0	0	0
30	PEMERINTAH KECAMATAN PENGARON			0			0			0			0	0	0	0
31	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI TABUK			0			0		1	1			0	0	1	1
32	PEMERINTAH KECAMATAN GAMBUS			0			0	1		1			0	1	0	1
33	PEMERINTAH KECAMATAN ARANIO			0			0			0	1		1	1	0	1
34	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA TIMUR			0			0		1	1			0	0	1	1
35	PEMERINTAH KECAMATAN PARAMASAN			0			0			0			0	0	0	0
36	PEMERINTAH KECAMATAN ASTAMBUL			0			0			0			0	0	0	0
37	PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT		1	1			0			0			0	0	1	1
38	PEMERINTAH KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG			0			0	1		1			0	1	0	1
39	PEMERINTAH KECAMATAN ALUH-ALUH			0			0	2		2	1		1	3	0	3
40	PEMERINTAH KECAMATAN KARANG INTAN			0			0	1		1			0	1	0	1
41	PEMERINTAH KECAMATAN CINTAPURI DARUSALAM			0			0			0			0	0	0	0

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN												JUMLAH		
		D.I			D.II			D.III			D.IV					
		L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JML
42	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI PINANG			0			0	1		1			0	1	0	1
43	PEMERINTAH KECAMATAN MATARAMAN			0			0	1	1	2			0	1	1	2
44	PEMERINTAH KECAMATAN BERUNTUNG BARU			0			0		1	1			0	0	1	1
45	PEMERINTAH KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR			0			0	2		2	1		1	3	0	3
46	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA BARAT			0			0			0			0	0	0	0
47	PEMERINTAH KECAMATAN TATAH MAKMUR			0			0			0			0	0	0	0
48	PEMERINTAH KECAMATAN KERTAK HANYAR			0			0			0			0	0	0	0
49	PEMERINTAH KELURAHAN KERTAK HANYAR			0			0	1		1			0	1	0	1
50	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI LULUT			0			0			0			0	0	0	0
51	PEMERINTAH KELURAHAN SEKUMPUL			0			0			0			0	0	0	0
52	PEMERINTAH KELURAHAN TANJUNG REMA DARAT			0			0			0			0	0	0	0
53	PEMERINTAH KELURAHAN MANARAP LAMA			0			0			0			0	0	0	0
54	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI PARING			0	1	1				0			0	0	1	1
55	PEMERINTAH KELURAHAN MANDARSARI			0			0	1	1	2			0	1	1	2
56	PEMERINTAH KELURAHAN GAMBUS			0			0			0			0	0	0	0
57	PEMERINTAH KELURAHAN PASAYANGAN			0			0			0		1	1	0	1	1
58	PEMERINTAH KELURAHAN GAMBUS BARAT			0			0			0			0	0	0	0
59	PEMERINTAH KELURAHAN			0			0			0			0	0	0	0

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN												JUMLAH		
		D.I			D.II			D.III			D.IV					
		L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JML
	MURUNG KERATON															
60	PEMERINTAH KELURAHAN JAWA			0			0			0			0	0	0	0
61	PEMERINTAH KELURAHAN KERATON			0	1		1			0			0	1	0	1
JUMLAH		1	9	10	6 0	4 3	103	19 6	59 4	790	3 1	9 7	128	28 8	74 3	103 1

15. REKAPITULASI PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN (S1, S2, S3)

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH		
		S1			S2			S3					
		L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JML
1	SEKRETARIAT DAERAH	28	30	58	12	11	23	1		1	41	41	82
2	STAF AHLI			0		1	1	2		2	2	1	3
3	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	3	7	10	3	4	7			0	6	11	17
4	INSPEKTORAT DAERAH	14	21	35	4	6	10			0	18	27	45
5	DINAS PENDIDIKAN	792	148 1	227 3	36	71	10 7		1	1	828	1553	2381
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	17	14	31	7	9	16			0	24	23	47
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6	8	14	7	8	15			0	13	16	29
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	4	10	3	2	5			0	9	6	15
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9	6	15	2		2			0	11	6	17
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15	17	32	4	7	11			0	19	24	43
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	5	6	5	5	10			0	6	10	16
12	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	5	3	8	4		4			0	9	3	12
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	8	14	22	5	4	9			0	13	18	31
14	DINAS PERTANIAN	12	12	24	5	10	15			0	17	22	39
15	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN	10	13	23	3	2	5			0	13	15	28

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH		
		S1			S2			S3					
		L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JML
	DAN PERDAGANGAN												
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2	7	9	2	3	5			0	4	10	14
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8	14	22	3	5	8	1		1	12	19	31
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3	7	10	2	4	6		1	1	5	12	17
19	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	21	9	30	2	7	9			0	23	16	39
20	DINAS PERHUBUNGAN	6	2	8	4	1	5	1		1	11	3	14
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	6	10		2	2			0	4	8	12
22	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	10	13	23	11	5	16			0	21	18	39
23	DINAS KESEHATAN	63	206	269	25	44	69	1	1	2	89	251	340
24	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	13	13	26	5	2	7	2		2	20	15	35
25	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	9	12	2	5	7		1	1	5	15	20
26	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN	6	4	10	5	4	9			0	11	8	19
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9	2	11	3	1	4			0	12	3	15
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA	45	95	140	31	46	77			0	76	141	217
29	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA	3	3	6	1		1			0	4	3	7

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH		
		S1			S2			S3					
		L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JML
30	PEMERINTAH KECAMATAN PENGARON	1	3	4	1		1			0	2	3	5
31	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI TABUK	2	2	4		2	2			0	2	4	6
32	PEMERINTAH KECAMATAN GAMPUT	2	1	3	2	1	3			0	4	2	6
33	PEMERINTAH KECAMATAN ARANIO	5	2	7			0			0	5	2	7
34	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	2		2		1	1			0	2	1	3
35	PEMERINTAH KECAMATAN PARAMASAN	1	1	2	3		3			0	4	1	5
36	PEMERINTAH KECAMATAN ASTAMBUL	2	2	4	1	1	2			0	3	3	6
37	PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT	4	2	6	1		1			0	5	2	7
38	PEMERINTAH KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	4	1	5			0	1		1	5	1	6
39	PEMERINTAH KECAMATAN ALUH- ALUH	5		5	1		1			0	6	0	6
40	PEMERINTAH KECAMATAN KARANG INTAN	1		1	2	3	5			0	3	3	6
41	PEMERINTAH KECAMATAN CINTAPURI DARUSALAM	5		5			0			0	5	0	5
42	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI PINANG	4		4			0			0	4	0	4
43	PEMERINTAH KECAMATAN MATARAMAN	3		3	2	1	3			0	5	1	6
44	PEMERINTAH KECAMATAN BERUNTUNG BARU	5	1	6			0			0	5	1	6
45	PEMERINTAH KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	4		4			0			0	4	0	4
46	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA BARAT	2	4	6	1	1				0	3	5	8
47	PEMERINTAH KECAMATAN TATAH MAKMUR	6	1	7		2	2			0	6	3	9

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH		
		S1			S2			S3					
		L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JML
48	PEMERINTAH KECAMATAN KERTAK HANYAR	1	4	5	2	2	4			0	3	6	9
49	PEMERINTAH KELURAHAN KERTAK HANYAR	2	1	3			0			0	2	1	3
50	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI LULUT	2	1	3	1		1			0	3	1	4
51	PEMERINTAH KELURAHAN SEKUMPUL	4		4			0			0	4	0	4
52	PEMERINTAH KELURAHAN TANJUNG REMA DARAT	4	4	8			0			0	4	4	8
53	PEMERINTAH KELURAHAN MANARAP LAMA	1	2	3			0			0	1	2	3
54	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI PARING	1	6	7			0			0	1	6	7
55	PEMERINTAH KELURAHAN MANDARSARI	1	1	2			0			0	1	1	2
56	PEMERINTAH KELURAHAN GAMPUT		1	1	1		1			0	1	1	2
57	PEMERINTAH KELURAHAN PASAYANGAN	1	1	2			0			0	1	1	2
58	PEMERINTAH KELURAHAN GAMPUT BARAT	2	2	4		1	1			0	2	3	5
59	PEMERINTAH KELURAHAN MURUNG KERATON	2	3	5			0			0	2	3	5
60	PEMERINTAH KELURAHAN JAWA	3	3	6			0			0	3	3	6
61	PEMERINTAH KELURAHAN KERATON		2	2			0			0	0	2	2
JUMLAH		120 4	207 6	328 0	21 4	28 4	49 6	9	4	13	1427	2364	3791



TABEL PENYAJIAN

DATA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

1. Jumlah PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin 5 Tahun Terakhir

TAHUN	PPPK & PPPK-PW				
	L	%	P	%	JUMLAH
2021	34	36.96	58	63.04	92
2022	149	30.72	336	69.28	485
2023	373	26.29	1046	73.71	1419
2024	704	30.01	1642	69.99	2346
2025 SEMESTER II	2011	40.87	2910	59.13	4921



2. Jumlah PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

USIA	PPPK & PPPK-PW		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
DIBAWAH 30	513	926	1439
31 - 40	1004	1402	2406
41 - 50	382	472	854
DIATAS 50	112	110	222
JUMLAH	2011	2910	4921

3. Jumlah PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	PPPK & PPPK PW		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
SD	4	0	4
SLTP	437	150	587
SLTA	399	205	604
D-1	0	0	0
D-II	0	0	0
D-III	149	482	631
D-IV	8	41	49
S-1/SARJANA	972	1951	2923
S-2/MAGISTER	42	81	123
S-3/DOKTOR	0	0	0
JUMLAH	2011	2910	4921

4. Jumlah PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Golongan

N O	GOLONGAN RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	GOLONGAN III	95	40	135
2	GOLONGAN V	199	57	256
3	GOLONGAN VII	137	441	578
4	GOLONGAN IX	608	1577	2185
5	GOLONGAN X	39	65	104
6	GOLONGAN PPPK-PW	933	730	1663
JUMLAH		2011	2910	4921

5. Jumlah PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan Dan Jenis Jabatan

NO .	GOLONGAN RUANG	FUNGSIONAL TERTENTU			FUNGSIONAL UMUM			JML.
		L	P	JML.	L	P	JML.	
1	GOLONGAN III	0	0	0	95	40	135	135
2	GOLONGAN V	67	6	73	132	51	183	256
3	GOLONGAN VII	62	208	270	75	233	308	578
4	GOLONGAN IX	542	1459	2001	66	118	184	2185
5	GOLONGAN X	21	35	56	18	30	48	104
6	GOLONGAN PPPK-PW	30	92	122	903	638	1541	1663
JUMLAH		692	1708	2522	386	472	2399	4921

6. REKAPITULASI PPPK & PPPK PW BERDASARKAN UNIT ORGANISASI DAN KELOMPOK JABATAN

N O	GOLONGAN RUANG	STRUKTURAL			FUNGSIONAL TERTEKUTU			FUNGSIONAL UMUM			JUMLAH		
		L	P	JM L	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	3	6	9	55	32	87	58	38	96
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	0	0	0	7	1	8	43	29	72	50	30	80
3	INSPEKTORAT DAERAH	0	0	0	2	1	3	4	4	8	6	5	11
4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	2	0	2	9	10	19	11	10	21
5	DINAS PENDIDIKAN	0	0	0	469	138 9	185 8	84	89	173	553	147 8	203 1
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	2	0	2	33	27	60	35	27	62
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	0	0	9	4	13	10	10	20	19	14	33
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	4	3	7	11	9	20	15	12	27
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	0	0	6	2	8	17	13	30	23	15	38
10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	5	5	10	256	122	378	261	127	388
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	0	0	0		2	2	16	12	28	16	14	30
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	1	3	4	21	20	41	22	23	45
13	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0	2	4	6	40	28	68	42	32	74
14	DINAS PEMBERDAYAAN	0	0	0	1	3	4	14	8	22	15	11	26

N O	GOLONGAN RUANG	STRUKTURAL			FUNGSIONAL TERTEUTU			FUNGSIONAL UMUM			JUMLAH		
		L	P	JM L	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
	MASYARAKAT DAN DESA												
15	DINAS PERTANIAN	0	0	0	8	5	13	57	20	77	65	25	90
16	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0	0	0	1	1	2	24	16	40	25	17	42
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	0	0	3	0	3	9	11	20	12	11	23
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	0	5	9	14	4	8	12	9	17	26
19	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0	0	0	71	8	79	13	7	20	84	15	99
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0	0	0	3	5	8	36	14	50	39	19	58
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	0	4	1	5	25	34	59	29	35	64
22	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	0	0	0	6	5	11	45	26	71	51	31	82
23	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	5	1	6	40	17	57	45	18	63
24	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	0	3	3	6	22	19		25	22	47
25	DINAS KESEHATAN	0	0	0	69	284	353	128	303	431	197	587	784
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	3		3	115	35	150	118	35	153
27	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA	0	0	0	19	42	61	93	111	204	112	153	265
28	PEMERINTAH KECAMATAN ASTAMBUL	0	0	0		1	1	2	5	7	2	6	8
29	PEMERINTAH KECAMATAN CINTAPURI DARUSALAM	0	0	0	1	0	1	1	2	3	2	2	4
30	PEMERINTAH KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	0	0	0		1	1		1	1	0	2	2
31	PEMERINTAH KECAMATAN BERUNTUNG BARU	0	0	0	2	0	2	1	2	3	3	2	5
32	PEMERINTAH KECAMATAN ARANIO	0	0	0		1	1	1	1	2	1	2	3
33	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI PINANG	0	0	0	1	0	1	3	4	7	4	4	8
34	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA	0	0	0	1	0	1	1	5	6	2	5	7
35	PEMERINTAH KECAMATAN GAMPUT	0	0	0	0	1	1	3	3	6	3	4	7

N O	GOLONGAN RUANG	STRUKTURAL			FUNGSIONAL TERTENTU			FUNGSIONAL UMUM			JUMLAH		
		L	P	JM L	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
36	PEMERINTAH KECAMATAN KERTAK HANYAR	0	0	0	1	0	1	1	3	4	2	3	5
37	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	0	0	0	0	0	0	2	4	6	2	4	6
38	PEMERINTAH KECAMATAN PENGARON	0	0	0	0	1	1	3	2	5	3	3	6
39	PEMERINTAH KECAMATAN PARAMASAN	0	0	0	1	0	1	3		3	4	0	4
40	PEMERINTAH KECAMATAN MATARAMAN	0	0	0	0	1	1	2	2	4	2	3	5
41	PEMERINTAH KECAMATAN TATAH MAKMUR	0	0	0	0	1	1	3	4	7	3	5	8
42	PEMERINTAH KECAMATAN KARANG INTAN	0	0	0	0	1	1	5	4	9	5	5	10
43	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI TABUK	0	0	0	0	1	1	2	4	6	2	5	7
44	PEMERINTAH KECAMATAN ALUH- ALUH	0	0	0	0	2	2	3	2	5	3	4	7
45	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA BARAT	0	0	0	1	1	2	3	3	6	4	4	8
46	PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT	0	0	0		1	1	1	2	3	1	3	4
47	PEMERINTAH KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
48	PEMERINTAH KELURAHAN TANJUNG REMA DARAT	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
49	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI PARING	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3
50	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI LULUT	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2
51	PEMERINTAH KELURAHAN SEKUMPUL	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
52	PEMERINTAH KELURAHAN KERTAK HANYAR	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
53	PEMERINTAH KELURAHAN MANARAP LAMA	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	1	3
54	PEMERINTAH KELURAHAN JAWA	0	0	0	0	0	0	3	2	5	3	2	5
55	PEMERINTAH KELURAHAN GAMBIT	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	1	3
56	PEMERINTAH KELURAHAN GAMBIT BARAT	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2
57	PEMERINTAH KELURAHAN KERATON	0	0	0	0	0	0	3	4	7	3	4	7
58	PEMERINTAH KELURAHAN MURUNG KERATON	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4

N O	GOLONGAN RUANG	STRUKTURAL			FUNGSIONAL TERTENTU			FUNGSIONAL UMUM			JUMLAH		
		L	P	JM L	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
59	PEMERINTAH KELURAHAN PASAYANGAN	0	0	0	0	0	0	4	3	7	4	3	7
60	PEMERINTAH KELURAHAN MANDARSARI	0	0	0	0	0	0	1	4	5	1	4	5
JUMLAH		0	0	0	722	180 0	252 2	128 9	111 0	235 8	201 1	291 0	492 1

7. REKAPITULASI PPPK & PPPK PW BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (SD, SMP, SMA)

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH		
		SD			SMP			SMA					
		L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JML	L	P	JML
1	SEKRETARIAT DAERAH			0	31	1	32	5	6	11	36	7	43
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)			0	11	1	12	17	9	26	28	10	38
3	INSPEKTORAT DAERAH			0	2		2		1	1	2	2	4
4	DINAS PENDIDIKAN			0	17	3	20	45	31	76	62	31	93
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			0	1		1	3		3	4	3	7
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			0	3	1	4	9	2	11	12	2	14
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			0	1		1	1		1	2	1	3
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			0	1		1	1	1	2	2	1	3
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			0	6	1	7	5	6	11	11	6	17
10	DINAS PERTANIAN			0	18	3	21	12	4	16	30	5	35
11	DINAS KESEHATAN			0	16	7	23	7	11	18	23	14	37
12	DINAS PERHUBUNGAN			0	12	2	14	9	8	17	21	15	36
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			0	2		2	7	9	16	9	11	20
14	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			0	3		3	6	6	12	9	6	15

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH		
		SD			SMP			SMA					
		L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JML	L	P	JML
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			0	2		2	2	1	3	4	1	5
16	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			0	3		3	4	1	5	7	1	8
17	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			0	5		5	1	3	4	6	3	9
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			0	1	1	2	1	2	3	2	2	4
19	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			0	7	2	9	7	8	15	14	9	23
20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			0	1		1		1	1	1	3	4
21	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	1		1	3		3	9	4	13	13	4	17
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			0	3		3	3	4	7	6	4	10
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	3		3	218	79	297	7	5	12	228	5	233
24	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN			0			0	14	1	15	14	80	94
25	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			0			0	76	9	85	76	9	85
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			0			0	112	34	146	112	34	146
27	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA			0	63	44	107	9	14	23	72	14	86
28	PEMERINTAH KECAMATAN GAMBUS			0	1	1	2			0	1	44	45

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH		
		SD			SMP			SMA					
		L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JML	L	P	JML
29	PEMERINTAH KECAMATAN ASTAMBUL			0			0	1	2	3	1	3	4
30	PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT			0			0			0	0	0	0
31	PEMERINTAH KECAMATAN ALUH-ALUH			0			0	1	1	2	1	1	2
32	PEMERINTAH KECAMATAN TATAH MAKMUR			0			0	2	1	3	2	1	3
33	PEMERINTAH KECAMATAN PARAMASAN			0			0	2		2	2	0	2
34	PEMERINTAH KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG			0			0			0	0	0	0
35	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI PINANG			0			0	2		2	2	0	2
36	PEMERINTAH KECAMATAN MATARAMAN			0			0			0	0	0	0
37	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI TABUK			0			0	1	3	4	1	3	4
38	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA			0			0	1		1	1	0	1
39	PEMERINTAH KECAMATAN KERTAK HANYAR			0	1	1	2		1	1	1	1	2
40	PEMERINTAH KECAMATAN PENGARON			0			0	1	1	2	1	2	3
41	PEMERINTAH KECAMATAN ARANIO			0			0	1		1	1	0	1
42	PEMERINTAH KECAMATAN KARANG INTAN			0	1	1	2	2	2	4	3	2	5
43	PEMERINTAH KECAMATAN CINTAPURI DARUSALAM			0			0	1	1	2	1	2	3
44	PEMERINTAH KECAMATAN BERUNTUNG BARU			0			0		1	1	0	1	1
45	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA BARAT			0			0	1	2	3	1	2	3
46	PEMERINTAH KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR			0			0		1	1	0	1	1
47	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA TIMUR							2		2	2	0	2

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH		
		SD			SMP			SMA					
		L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JML	L	P	JML
48	PEMERINTAH KELURAHAN TANJUNG REMA DARAT			0			0		1	1	0	1	1
49	PEMERINTAH KELURAHAN MURUNG KERATON			0	1		1	1		1	2	0	2
50	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI PARING			0		1	1			0	0	0	0
51	PEMERINTAH KELURAHAN SEKUMPUL			0	1		1	1		1	2	1	3
52	PEMERINTAH KELURAHAN MANARAP LAMA			0			0	1	1	2	1	1	2
53	PEMERINTAH KELURAHAN KERATON			0			0	1	1	2	1	1	2
54	PEMERINTAH KELURAHAN PASAYANGAN			0	1		1	1	2	3	2	2	4
55	PEMERINTAH KELURAHAN MANDARSARI			0			0	1	1	2	1	1	2
56	PEMERINTAH KELURAHAN GAMPUT				1		1			0	1	0	1
57	PEMERINTAH KELURAHAN GAMPUT BARAT										0	0	0
58	PEMERINTAH KELURAHAN KERTAK HANYAR							1		1	1	0	1
59	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI LULUT							1	1	2	1	1	2
60	PEMERINTAH KELURAHAN JAWA			0		1	1	1	1	2	1	1	2
JUMLAH		4	0	4	437	150	587	399	205	604	840	355	1195

8. REKAPITULASI PPPK & PPPK PW BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN (D-I, D-II, D-III, D-IV)

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN												JUMLAH		
		D.I			D.II			D.III			D.IV					
		L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JML
1	SEKRETARIAT DAERAH		1	1		1	1	2	3	5	5	5	10	7	10	17
2	STAF AHLI													0	0	0
3	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)			0			0	1	1	2		1	1	1	2	3
4	INSPEKTORAT DAERAH			0			0			0		2	2	0	2	2
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			0			0	1		1			0	1	0	1
6	DINAS PENDIDIKAN			0	56	41	97	1	10	11		1	1	57	52	109
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			0			0	1	2	3	1	1	2	2	3	5
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			0			0	1	1	2			0	1	1	2
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			0			0	1	1	2	1	1	2	2	2	4
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			0			0	4	6	10	3	2	5	7	8	15
11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN			0			0	2	3	5		1	1	2	4	6

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN											JUMLAH			
		D.I			D.II			D.III			D.IV					
		L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JML
	LINGKUNGAN HIDUP															
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			0			0	1	4	5			0	1	4	5
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			0			0	1	2	3			0	1	2	3
14	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			0			0	1	3	4	1	3	4	2	6	8
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			0			0	1	3	4	1	1	2	2	4	6
16	DINAS PERTANIAN			0			0	5	2	7			0	5	2	7
17	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			0			0	4	1	5	1	1	2	5	2	7
18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			0			0		1	1			0	0	1	1
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			0			0	5	5	10		1	1	5	6	11
20	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			0			0	1	1	2			0	1	1	2
21	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN			0			0	1	3	4			0	1	3	4
22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			0			0	4	2	6	1		1	5	2	7
23	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN			0			0	7	2	9	1		1	8	2	10

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN											JUMLAH			
		D.I			D.II			D.III			D.IV					
		L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JML
24	DINAS PERHUBUNGAN			0	2		2	8	2	10	3	6	9	13	8	21
25	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1		1			0	1	3	4		1	1	2	4	6
26	DINAS KESEHATAN		6	6			0	209	832	1041	10	96	106	219	934	1153
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			0			0	2	1	3			0	2	1	3
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA		1	1	1		1	67	170	237	8	14	22	76	185	261
29	PEMERINTAH KECAMATAN ASTAMBUL			0			0		1	1			0	0	1	1
30	PEMERINTAH KECAMATAN CINTAPURI DARUSALAM			0			0			0			0	0	0	0
31	PEMERINTAH KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR			0			0	2		2	1		1	3	0	3
32	PEMERINTAH KECAMATAN BERUNTUNG BARU			0			0	1	1	2			0	1	1	2
33	PEMERINTAH KECAMATAN ARANIO			0			0			0	1		1	1	0	1
34	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI PINANG			0			0	1	1	2			0	1	1	2
35	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA			0			0		2	2			0	0	2	2
36	PEMERINTAH KECAMATAN GAMBUT			0			0	1		1			0	1	0	1
37	PEMERINTAH KECAMATAN KERTAK HANYAR			0			0			0			0	0	0	0
38	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA TIMUR			0			0		2	2			0	0	2	2
39	PEMERINTAH KECAMATAN PENGARON			0			0			0			0	0	0	0
40	PEMERINTAH KECAMATAN PARAMASAN			0			0			0			0	0	0	0

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN											JUMLAH			
		D.I			D.II			D.III			D.IV					
		L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JML
41	PEMERINTAH KECAMATAN MATARAMAN			0			0	1	1	2			0	1	1	2
42	PEMERINTAH KECAMATAN TATAH MAKMUR			0			0			0			0	0	0	0
43	PEMERINTAH KECAMATAN KARANG INTAN			0			0	1		1			0	1	0	1
44	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI TABUK			0			0		1	1			0	0	1	1
45	PEMERINTAH KECAMATAN ALUH-ALUH			0			0	2	1	3	1		1	3	1	4
46	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA BARAT			0			0	1		1			0	1	0	1
47	PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT		1	1			0			0			0	0	1	1
48	PEMERINTAH KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG			0			0	1		1			0	1	0	1
49	PEMERINTAH KELURAHAN TANJUNG REMA DARAT			0			0		1	1			0	0	1	1
50	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI PARING			0		1	1			0			0	0	1	1
51	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI LULUT			0			0			0			0	0	0	0
52	PEMERINTAH KELURAHAN SEKUMPUL			0			0			0			0	0	0	0
53	PEMERINTAH KELURAHAN KERTAK HANYAR			0			0	1		1			0	1	0	1
54	PEMERINTAH KELURAHAN MANARAP LAMA			0			0			0			0	0	0	0
55	PEMERINTAH KELURAHAN JAWA			0			0			0			0	0	0	0
56	PEMERINTAH KELURAHAN GAMBUS			0			0			0			0	0	0	0
57	PEMERINTAH KELURAHAN GAMBUS BARAT			0			0			0			0	0	0	0
58	PEMERINTAH KELURAHAN KERATON			0	1		1			0			0	1	0	1

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN												JUMLAH		
		D.I			D.II			D.III			D.IV					
		L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JML
59	PEMERINTAH KELURAHAN MURUNG KERATON			0			0			0			0	0	0	0
60	PEMERINTAH KELURAHAN PASAYANGAN			0			0			0		1	1	0	1	1
61	PEMERINTAH KELURAHAN MANDARSARI			0			0	1	1	2			0	1	1	2
JUMLAH		1	9	10	6 0	4 3	103	34 5	107 6	142 1	3 9	13 8	177	44 5	126 6	171 1

9. REKAPITULASI PPPK & PPPK PW BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN (S1, S2, S3)

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH		
		S1			S2			S3					
		L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JML
1	SEKRETARIAT DAERAH	49	59	108	12	11	23	1		1	62	70	132
2	STAF AHLI					1	1	2		2	2	1	3
3	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	24	26	50	3	4	7			0	27	30	57
4	INSPEKTORAT DAERAH	18	25	43	4	6	10			0	22	31	53
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13	14	27	3	2	5			0	16	16	32
6	DINAS PENDIDIKAN	128 2	292 0	420 2	36	72	108		1	1	131 8	2993	4311
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	39	37	76	7	9	16			0	46	46	92
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	22	22	44	7	8	15			0	29	30	59

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH		
		S1			S2			S3					
		L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JML
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
9	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH	21	17	38	2		2			0	23	17	40
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	26	25	51	4	7	11			0	30	32	62
11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	42	52	94	11	5	16			0	53	57	110
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	17	24	41	5	4	9			0	22	28	50
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	23	31	54	3	5	8	1		1	27	36	63
14	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	30	27	57	2	5	7		1	1	32	33	65
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14	15	29	2	4	6		1	1	16	20	36
16	DINAS PERTANIAN	40	27	67	9	11	20			0	49	38	87
17	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	28	27	55	5	2	7	2		2	35	29	64
18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	12	15	27	5	5	10			0	17	20	37
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7	19	26	2	3	5			0	9	22	31

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH		
		S1			S2			S3					
		L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JML
20	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	13	8	21	4		4			0	17	8	25
21	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN	30	22	52	5	4	9			0	35	26	61
22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	22	30	52		2	2			0	22	32	54
23	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	58	34	92	2	7	9			0	60	41	101
24	DINAS PERHUBUNGAN	30	8	38	4	1	5	1		1	35	9	44
25	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	24	26	50	4	2	6			0	28	28	56
26	DINAS KESEHATAN	102	293	395	53	92	145	1	1	2	156	386	542
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13	2	15	3	1	4			0	16	3	19
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA	54	115	169	40	77	117			0	94	192	286
29	PEMERINTAH KECAMATAN ASTAMBUL	3	5	8	1	1	2			0	4	6	10
30	PEMERINTAH KECAMATAN CINTAPURI DARUSALAM	6	1	7			0			0	6	1	7
31	PEMERINTAH KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	4	1	5			0			0	4	1	5
32	PEMERINTAH KECAMATAN BERUNTUNG BARU	7	2	9			0			0	7	2	9
33	PEMERINTAH KECAMATAN ARANIO	5	4	9			0			0	5	4	9
34	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI PINANG	6	3	9			0			0	6	3	9

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH		
		S1			S2			S3					
		L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JML
35	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA	4	6	10	1		1			0	5	6	11
36	PEMERINTAH KECAMATAN GAMBUT	4	4	8	2	1	3			0	6	5	11
37	PEMERINTAH KECAMATAN KERTAK HANYAR	2	5	7	2	2	4			0	4	7	11
38	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	2	3	5		1	1			0	2	4	6
39	PEMERINTAH KECAMATAN PENGARON	3	5	8	1		1			0	4	5	9
40	PEMERINTAH KECAMATAN PARAMASAN	3	1	4	3		3			0	6	1	7
41	PEMERINTAH KECAMATAN MATARAMAN	5	3	8	2	1	3			0	7	4	11
42	PEMERINTAH KECAMATAN TATAH MAKMUR	7	5	12		2	2			0	7	7	14
43	PEMERINTAH KECAMATAN KARANG INTAN	3	2	5	2	3	5			0	5	5	10
44	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI TABUK	3	4	7		2	2			0	3	6	9
45	PEMERINTAH KECAMATAN ALUH-ALUH	7	2	9	1		1			0	8	2	10
46	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA BARAT	4	6	10	1	1	2			0	5	7	12
47	PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT	5	5	10	1		1			0	6	5	11
48	PEMERINTAH KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	5	1	6			0	1		1	6	1	7
49	PEMERINTAH KELURAHAN TANJUNG REMA DARAT	4	6	10			0			0	4	6	10
50	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI PARING	2	7	9			0			0	2	7	9
51	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI LULUT	2	1	3	1		1			0	3	1	4

N O	GOLONGAN RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH		
		S1			S2			S3					
		L	P	JML	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JML
52	PEMERINTAH KELURAHAN SEKUMPUL	4		4			0			0	4	0	4
53	PEMERINTAH KELURAHAN KERTAK HANYAR	2	1	3			0			0	2	1	3
54	PEMERINTAH KELURAHAN MANARAP LAMA	2	2	4			0			0	2	2	4
55	PEMERINTAH KELURAHAN JAWA	5	3	8			0			0	5	3	8
56	PEMERINTAH KELURAHAN GAMPUT	1	2	3	1		1			0	2	2	4
57	PEMERINTAH KELURAHAN GAMPUT BARAT	3	3	6		1	1			0	3	4	7
58	PEMERINTAH KELURAHAN KERATON	2	5	7			0			0	2	5	7
59	PEMERINTAH KELURAHAN MURUNG KERATON	4	3	7			0			0	4	3	7
60	PEMERINTAH KELURAHAN PASAYANGAN	3	2	5			0			0	3	2	5
61	PEMERINTAH KELURAHAN MANDARSARI	1	4	5			0			0	1	4	5
JUMLAH		217 6	402 7	620 3	25 6	36 5	621	9	4	13	244 1	4396	6837